KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Upaya Forum Guru Besar Batalkan Revisi UU KPK
Tanggal : Rabu, 02 Maret 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Upaya Forum Guru Besar Batalkan Revisi UU KPK

OLEH **AGUS RAHARJO**

Forum Guru Besar seluruh Indonesia, Selasa (1/3), mendatangi gedung DPR RI untuk meminta revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicabut dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2016. Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi Forum Guru Besar yang dikirim melalui beberapa perwakilannya kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. "Surat ini doa, harapan, dan dukungan pada DPR agar melakukan yang terbaik, khususnya tidak melakukan revisi UU KPK," ujar Guru Besar IPB Asep Saefuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/3).

Rombongan Forum Guru Besar dipimpin Guru Besar IPB Asep Saefuddin beserta perwakilan UGM Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra, Guru Besar Universitas Sahid, Giyatmi dan Kholil. Mereka membawa surat yang sudah ditandatangani oleh 161 guru besar seluruh Indonesia yang juga meminta agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

Asep Saefuddin mengatakan, Forum Guru Besar ini terdiri atas guru besar dari universitas negeri dan swasta. Dukungan untuk KPK ini dinilai dipertukan saat ini agar posisi KPK tidak menjadi lemah akibat revisi yang akan dilakukan pemerintah bersama DPR. "Ini upaya kami memperkuat posisi lembaga KPK yang menurut kami diperlukan," ujar Asep.

Asep melanjutkan, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan permintaan dari Forum Guru Besar ini. Namun, Forum Guru Besar menganggap, lembaga DPR yang sangat bisa diajak berbicara soal keinginan para guru besar ini. Sebab, DPR adalah lembaga yang mewakili rakyat. "Dari situ kami mohon ada pertemuan dengan pimpinan DPR dan anggota untuk tidak dimasukkan dalam prolegnas," kata Asep.

Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra menegaskan, revisi UU KPK saat ini hanya akan berujung pada pelemahan KPK. Sehingga, wajar jika Forum Guru Besar meminta pembahasan revisi UU KPK dicabut dari prolegnas. "Kami datang bersama, berpikir kalau DPR periode sekarang merevisi UU KPK akan berujung pada pelemahan," ujar Saldi.

Saldi melanjutkan, dalam draf revisi yang akan dijadikan usulan DPR, empat poin revisi merupakan bentuk pelemahan KPK. Yaitu, terkait pengaturan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan penyidik independen. "Empat substansi ini memperkuat pelemahan KPK," kata dia menegaskan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti surat permintaan dari Forum Guru Besar. Apalagi, permintaan itu disampaikan melalui surat resmi dan ditandatangani oleh lebih dari 150 guru besar dari universitas negeri dan swasta di Indonesia. "Surat permintaan Forum Guru Besar akan dibawa ke rapat pimpinan dan diserahkan ke fraksi-fraksi melalui Badan Musyawarah (Bamus)," ujar Fadli, Selasa (1/3).

Fadli menceritakan, perjalanan revisi UU KPK di DPR sebenarnya juga menimbulkan pro kontra. Sebab, sebagai usulan dewan, internal DPR masih belum kompak. Beberapa fraksi masih tidak sepakat dengan pengajuan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi inisiatif DPR.

Sejak pertama kali digulirkan untuk direvisi, imbuh wakil ketua umum Partai Gerindra ini, inisiatif revisi sebenarnya datang dari pemerintah. Dalam perjalanannya, justru DPR yang diposisikan *ngotot* untuk melakukan revisi. Namun, akhirnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, disepakati pembahasan revisi UU KPK akan ditunda.

Terkait permintaan Forum Guru Besar agar revisi UU KPK dicabut dari prolegnas, Fadli mengatakan masih mungkin dilakukan. Namun, hal itu bergantung pada kesepakatan antarfraksi di DPR RI. Masukan Forum Guru Besar akan menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh fraksi apakah akan mencabut revisi UU KPK. "Permintaan guru besar ini masukan besar karena juga ada surat resmi dari Forum Guru Besar." ■ **ed:** andri saubani

RAKHMAWATY LA'LANG/REPUBLIKA



AKSI MAHASISWA Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM Seluruh Indonesia melakukan "Aksi Nasional Menolak Revisi UU KPK" di depan gedung DPR, Jakarta, belum lama ini. Revisi UU KPK dianggap upaya pelemahan KPK.